

PENILAIAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

TANGGAPAN ATAS LAPORAN
TRAC (TRANSPENCY IN CORPORATE REPORTING)

SELY MARTINI





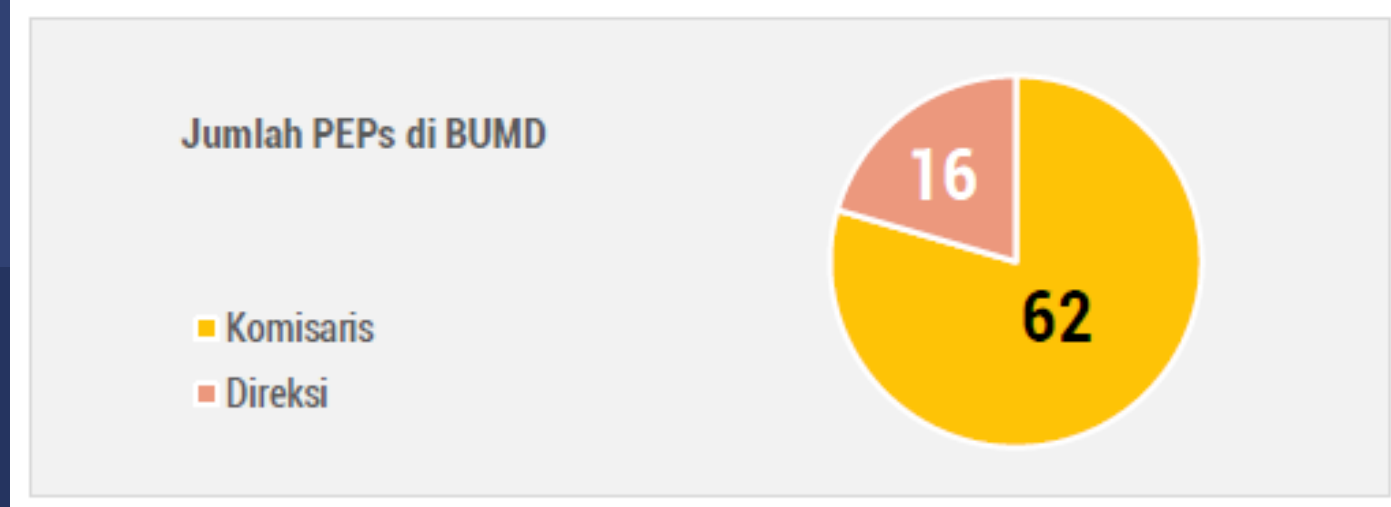
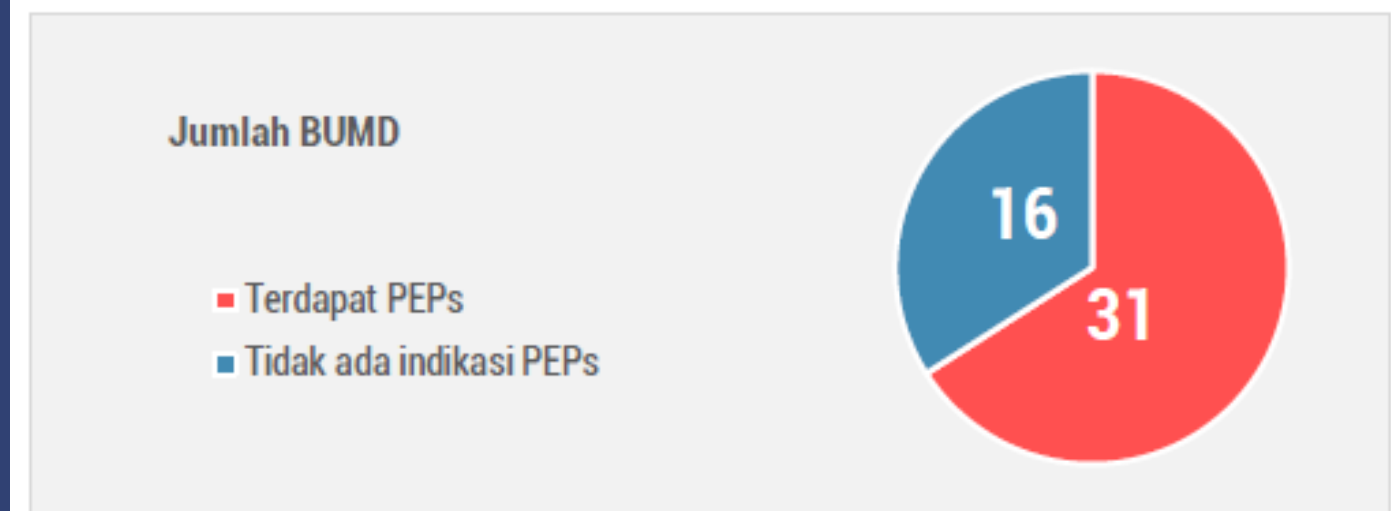
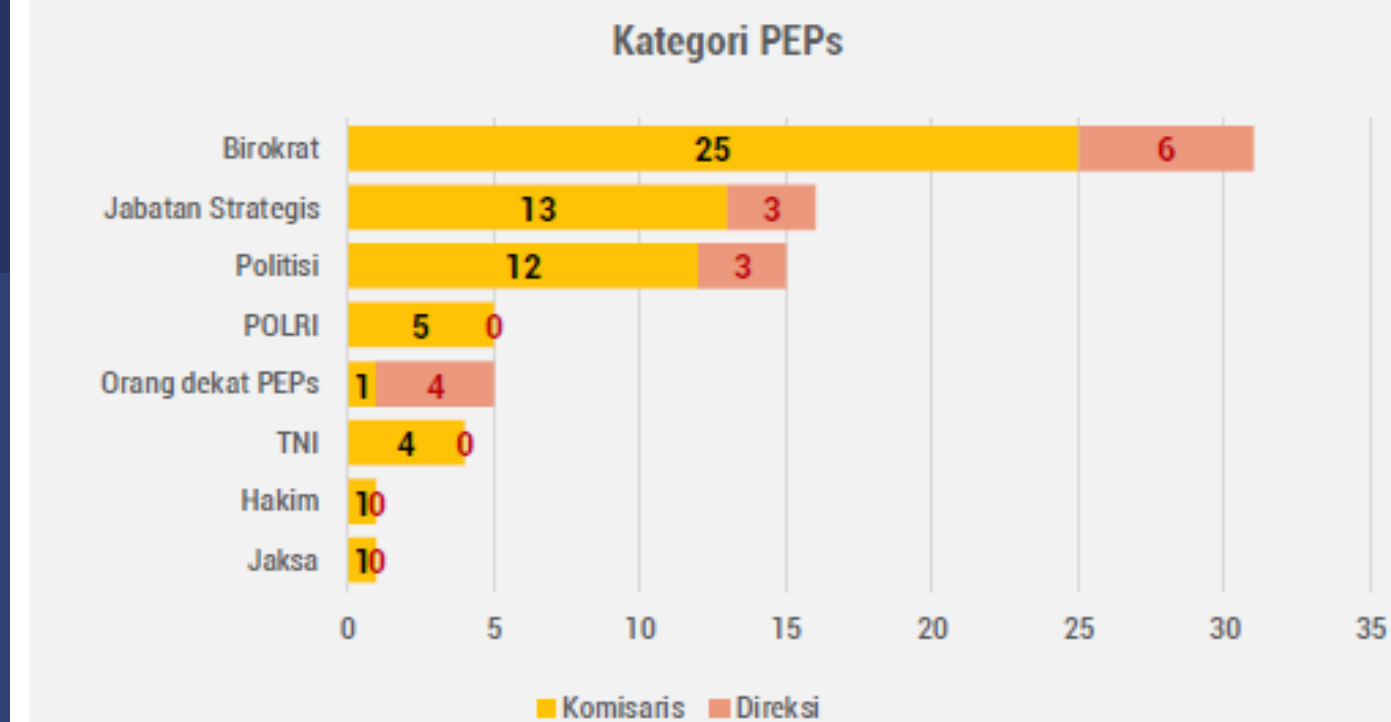
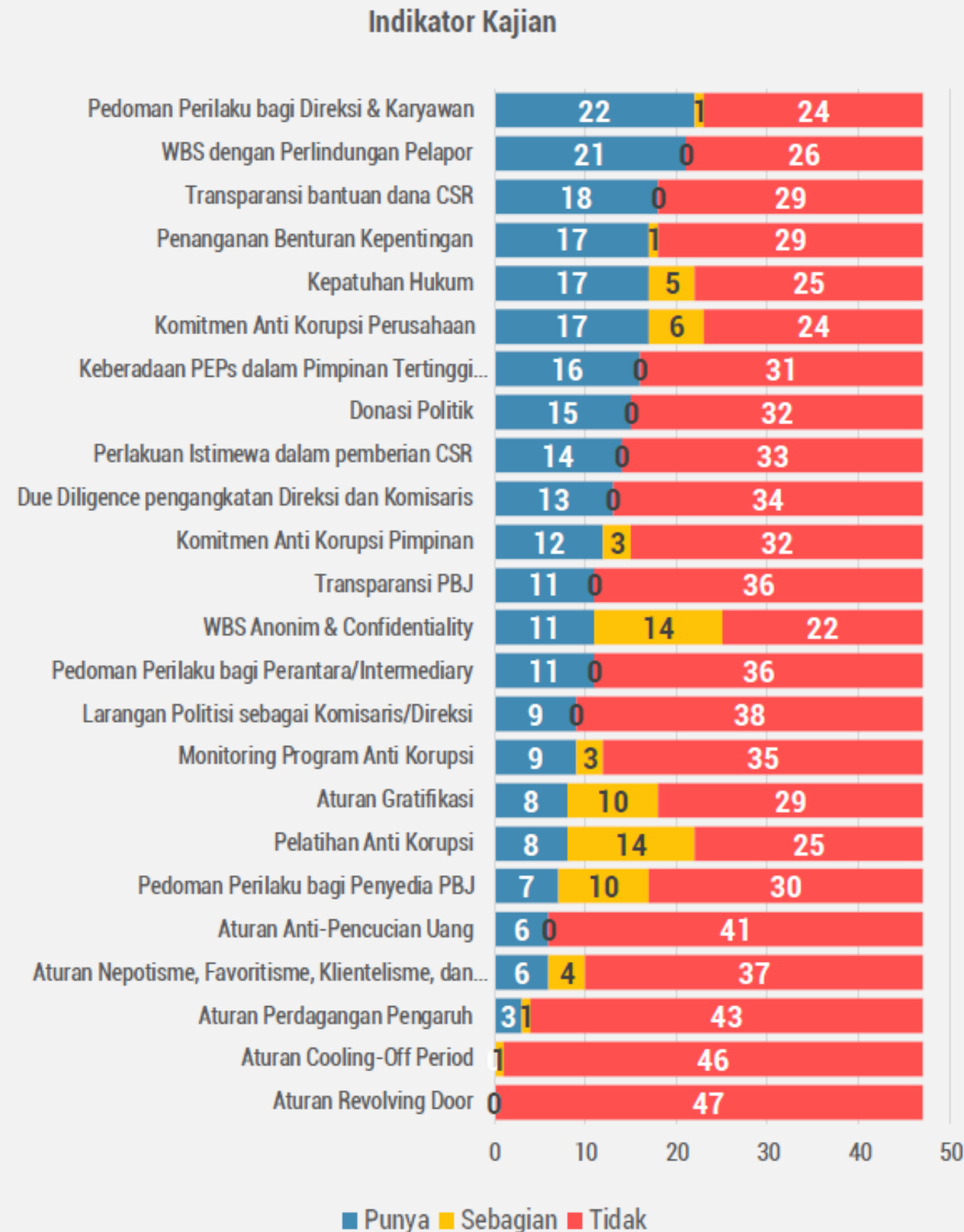
TABLE OF CONTENT

01. Introduction
Visi Integritas and TRAC

02. Laporan TRAC BUMD
insight dari hasil TRAC 47 BUMD

03. TRAC & SMAP
Bagaimana SMAP dapat membantu TRAC

04. Rekomendasi
Apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas BUMD



Sumber:Transparansi Internasional Indonesia 2023

KONTEKS

Masalah BUMD: kerugian, keterbatasan informasi, peran ganda, resiko korupsi, program pencegahan korupsi

01

BUMD Indonesia

Ada 1056 BUMD dengan aset sebesar Rp.899,4 T dan ekuitas Rp.236,6T

02

BUMD sebagai organisasi hibrid

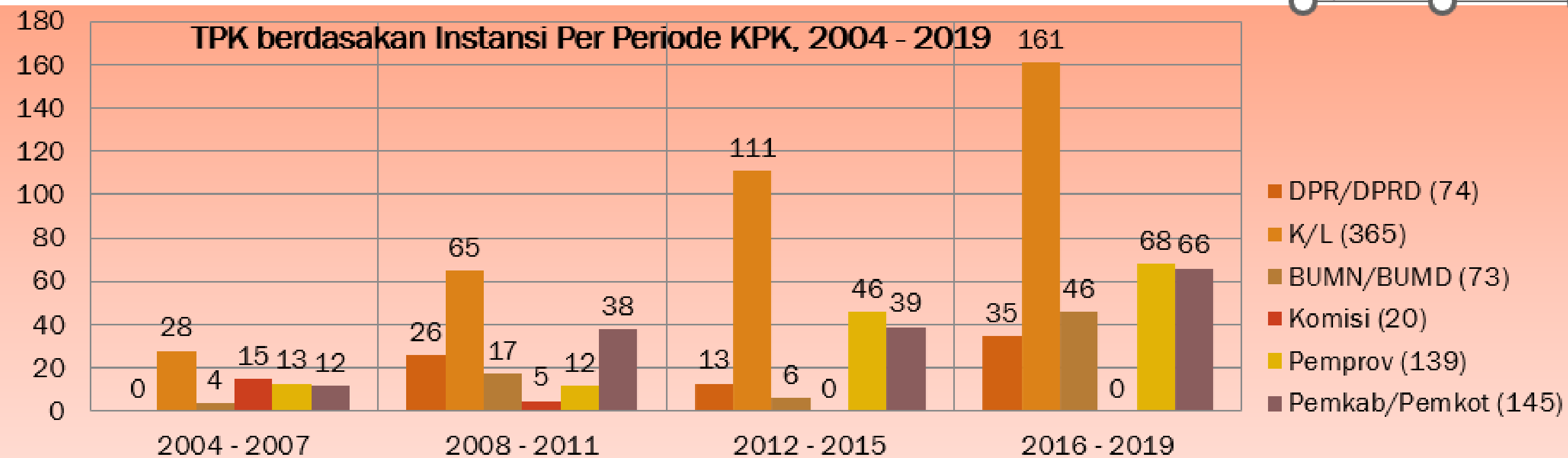
pros & cons lembaga hibrid / peran ganda

03

Transparansi dan Akuntabilitas BUMD

keterbatasan informasi mengenai kinerja BUMD.





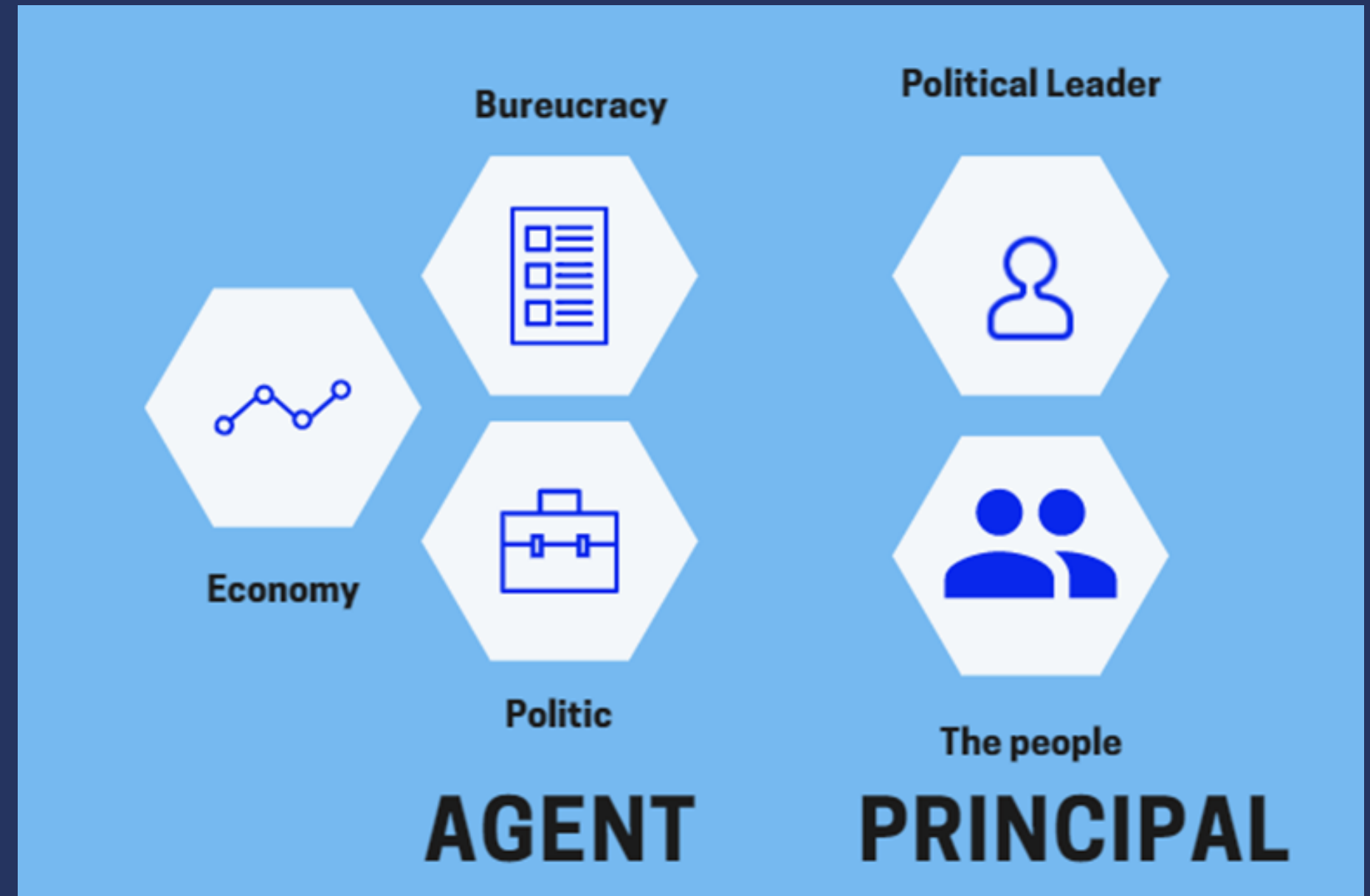
Jika dilihat dari instansi TPK yang ditangani oleh KPK, maka selama periode 2004 sampai 2019 terdapat 826 kasus :

- Pada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebanyak 365 atau setara dengan 44,2% .
- Pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota sebanyak 155 (18,8%)
- Pada pemda tingkat provinsi sebanyak 139 (16,8%).
- Dan pada BUMN/D sebanyak 73 kasus (8,8%).

BUMD sebagai organisasi hibrid

•SOEs have two principal objectives, namely economic benefits and distribution of public services. These goals evolve in line with social, economic, and political developments and its dynamics

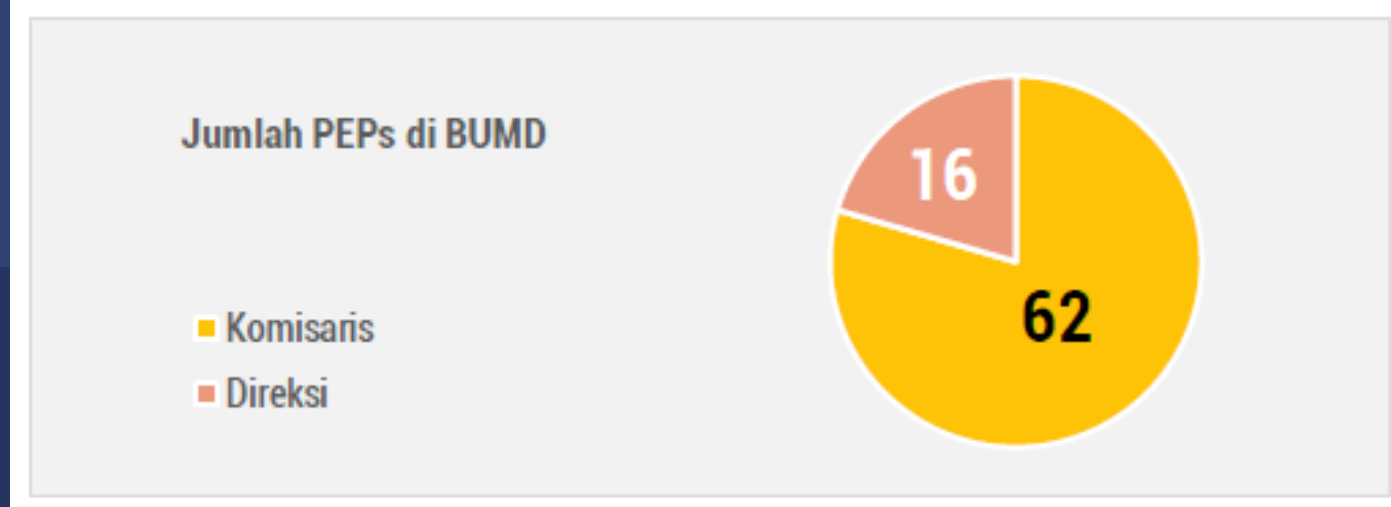
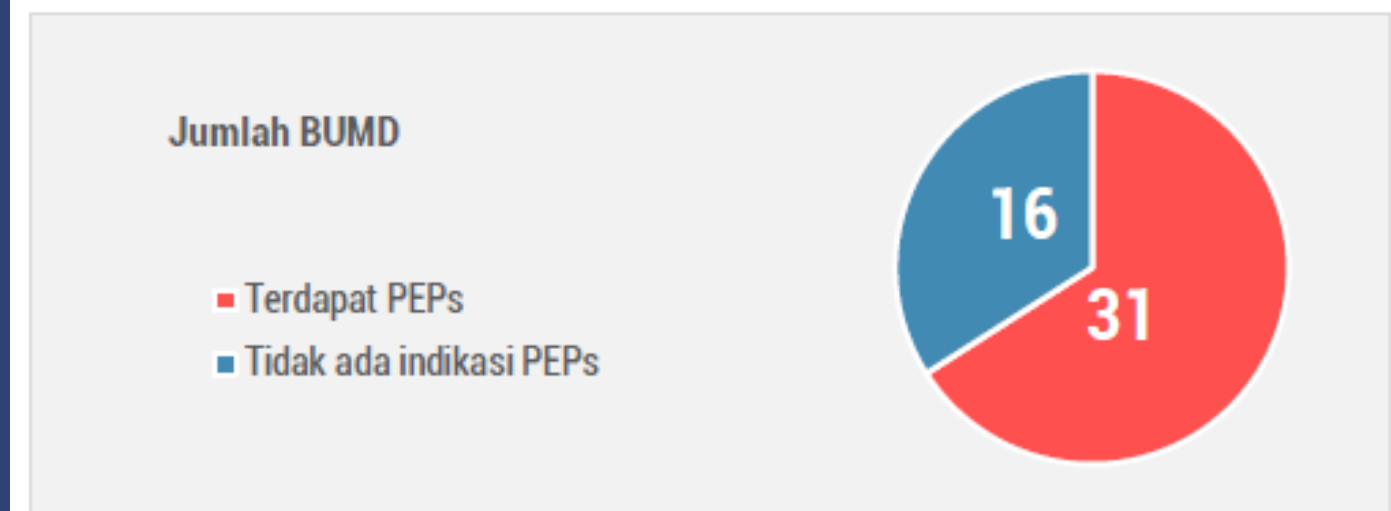
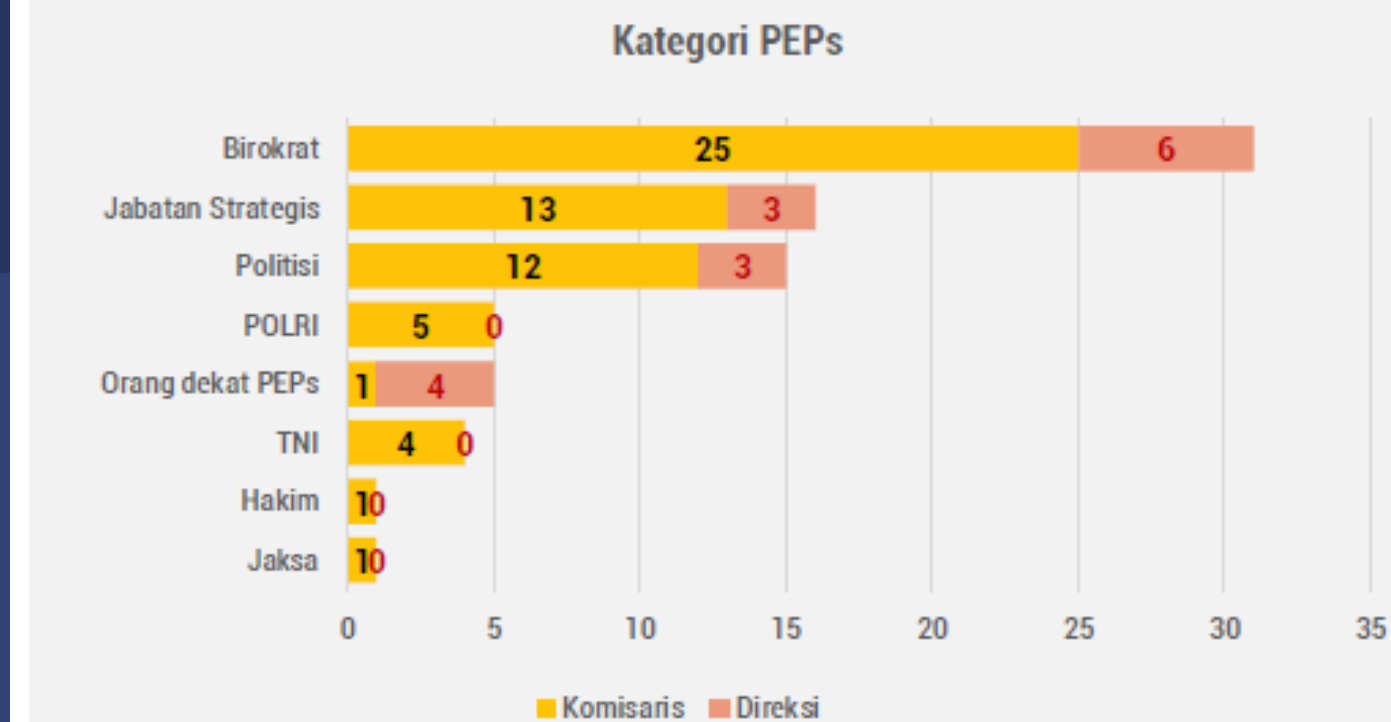
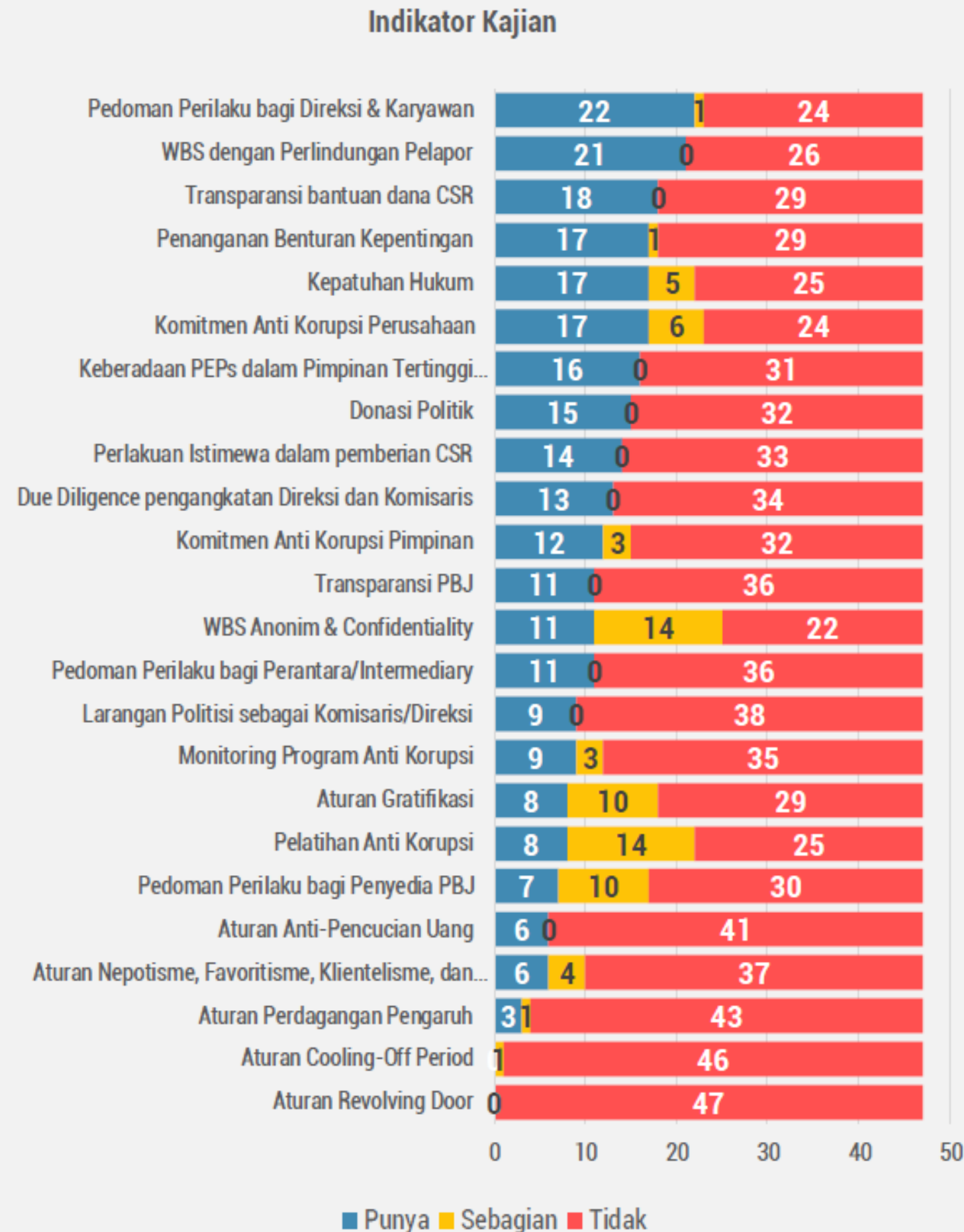
•SOE are very vulnerable to criminal acts of corruption because of their closeness to the government bureaucracy, politicians, and state officials, and the scale of their large value assets and domination of basic services that significantly affect the public (Wilkinson, 2017).



TRAC - TRANSPARENCY IN CORPORATE REPORTING

1. Komitmen Anti Korupsi
2. Ruang Lingkup Kebijakan Antikorupsi Perusahaan
3. Pengungkapan Kebijakan Internal
4. Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perlindungan Pelapor dan Kerahasiaan
5. Pengaturan Interaksi Politisi, PEP dan Pengaturan CSR
6. Program Pelatihan dan Pemantauan Program Antikorupsi.





Sumber:Transparansi Internasional Indonesia 2023

ISO 37001 - SMAP

SISTEM MANAGEMEN

ANTI-PENYUAPAN



Definisi

Sistem yang dirancang untuk menaati perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko penyuapan

Tools

SMAP merupakan tools untuk melawan suap dan membangun budaya anti-suap di perusahaan/organisasi.

TRAC - SMAP

Ada 14 BUMD yang telah tersertifikasi SMAP

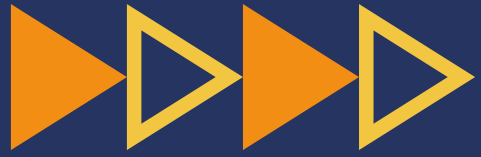
Pedoman

Pedoman penggunaan yang dirancang untuk membantu organisasi membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan anti-penyuapan

LINGKUP **SNI ISO 37001**

PANDUAN	TERIMA SUAP	BERI SUAP	KONDISI SUAP
SMAP	DARI:	KEPADA:	BERLAKU:
Menetapkan Memelihara Meninjau Meningkatkan	Personil (atas nama organisasi atau pribadi) & Rekan Bisnis	Personil (atas nama organisasi atau pribadi) & Rekan Bisnis	Langsung & Tidak Langsung Semua Sektor Publik, Swasta dan Nirlaba

(SNI ISO 37001:2016 Klausul 1)



MANFAAT SMAP BAGI PERUSAHAAN

01

Membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi penyuapan

02

Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian akibat investigasi oleh aparat penegak hukum yang dapat menurunkan reputasi perusahaan

03

Perusahaan akan semakin meningkat kredibilitasnya baik di mata publik, pelanggan, dan investor dalam negeri maupun luar negeri

04

Meminimalkan financial losses dan meningkatkan financial gains melalui berbagai upaya efisiensi

05

qMensejajarkan diri dengan values yang dimiliki perusahaan – perusahaan mancanegara

REKOMENDASI SMAP BUMD



Penyiapan regulasi. Untuk BUMN sudah ada Surat KemenBUMN Tahun 2020 .S-17 / S.MBU / 02 / 2020 yang mewajibkan seluruh BUMN tersertifikasi ISO 37001



PENDAMPINGAN



PROGAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN KORUPSI HARUSNYA
BUKAN HANYA FORMALITAS TETAPI
BAGAIMANA SISTEM TERSEBUT
TERINSTITUSIONALISASI





TERIMA KASIH

THANK YOU

